



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ursula Hadia

Universitas Nusa Cendana

Nikson Tameno

Universitas Nusa Cendana

Cicilia A. Tungga

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : ursulahadia14@gmail.com

Abstract This study aims to determine the analysis of government financial performance in increasing PAD in East Nusa Tenggara Province. The type of research used in this study is descriptive with a quantitative research approach. The source of data in this study is secondary data with document study data collection techniques. The technical data used in this research is secondary data with data collection techniques of document study. The data analysis techniques used are financial independence ratio analysis, financial effectiveness and efficiency ratio analysis and financial decentralization ratio analysis. The results of this research show that the Regional Financial Independence Ratio during the 2019-2023 period has slightly increased. However, the level of independence is still relatively low because there is still a dominant role of the central government. The Regional Original Revenue (PAD) Effectiveness Ratio in NTT Province during the 2019-2023 period can be categorized as less effective. The Efficiency Ratio of Regional Original Revenue (PAD) shows that the financial performance of the NTT Province government can be categorized as very efficient. For the average ratio of the degree of decentralization within a period of 5 (five) years, it has slightly increased every year, but its financial capacity is still in the less capable category.

Keywords: Local Government Financial Independence, Regional Financial Effectiveness and Efficiency, Regional Financial Decentralization.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan Pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis rasio kemandirian keuangan, analisis rasio efektivitas dan efisiensi keangan dan analisis rasio desentralisasi keuangan. Hasil penelitan ini menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2019-2023 sedikit mengalami kenaikan. Namun tingkat kemandirian masih tergolong rendah karena masih terdapat peran dominan pemerintah pusat. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi NTT selama periode 2019-2023 dapat dikategorikan kurang efektif. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Provinsi NTT dapat dikategorikan sangat efisien. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sedikit mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi kemampuan keuangannya masih dalam kategori kurang mampu.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah, Desentralisasi Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Kesuksesan sebuah organisasi tidak lepas dari peran penting anggota yang ada di dalamnya. Kualitas kinerja dapat dikatakan baik apabila tujuan organisasi dapat tercapai. Hasil dari penilaian kinerja tersebut nantinya dapat menjadi rujukan untuk dilakukan evaluasi kedepannya, agar organisasi mampu meningkatkan kualitas organisasi dan SDM. Hasil penilaian tersebut juga dapat dijadikan referensi bagi organisasi terkait untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam organisasi (Macella, 2020).

Kinerja instansi pemerintah daerah (Pemda) merupakan gambaran tentang pencapaian rencana dan realisasi pemerintah terhadap kemampuan dan langkah-langkah atau strategi yang dapat mengindikasikan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemda sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada tahun 2020. Kinerja dibutuhkan agar adanya pengukuran ketercapaian sasaran strategis berdasarkan rumusan indikator-indikator kinerja beserta target yang sudah ditetapkan agar menjadi landasan atau panduan.

Rondonuwu dkk (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Lucky, 2013).

Persentase realisasi pencapaian indikator besaran PAD dari tahun 2016-2020 secara keseluruhan sudah hampir memenuhi target penerimaan realisasi anggaran bahkan sampai melampaui target. Dapat dilihat dari Pencapaian tertinggi realisasi PAD tahun 2017 sebesar 104,50% dan tahun 2018 sebesar 102,22 %. Walaupun besaran PAD tahun 2016-2020 sudah hampir mencapai target anggaran PAD, akan tetapi pada beberapa bidang seperti pada bidang pengelolaan, penataan, pemanfaatan dan pengamanan aset pencapaian target kinerja pemerintah Provinsi NTT masih perlu banyak peningkatan lagi menyangkut jumlah bidang tanah yang sudah disertifikasi, guna untuk kejelasan aset milik pemerintah provinsi NTT dan

mencegah pemindahtanganan aset ke pihak lain sehingga mencapai visi dan misi pemerintah provinsi NTT (Renstra BPAD Provinsi NTT, 2018).

Sumber penerimaan PAD Provinsi NTT telah memberikan kontribusi yang signifikan, akan tetapi perannya belum cukup kuat dalam menopang APBD secara keseluruhan, sehingga ketergantungan anggaran belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat besar. Dengan kata lain, kemampuan daerah dalam mengandalkan sumber pembiayaan belanja daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masih tinggi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD masih sulit dilakukan karena transfer dana dari pusat seperti DAU, bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Khusus maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah, bahkan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Selama Periode Tahun 2018-2023, penerimaan dari sektor PAD terus mengalami peningkatan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi NTT.

Pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, serta beberapa kajian Pemerintah Provinsi NTT (BPAD) dengan LSM dan Perguruan Tinggi di NTT yang dijelaskan dalam Renstra BPAD NTT (2018) bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD yang disebabkan oleh relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, total penerimaan daerah yang kecil, Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, kurangnya kepatuhan wajib pajak, sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta belum tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjelaskan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi NTT belum optimal.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien

tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan pemerintah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan pemerintah (Kuncoro, 2007).

Dalam rangka mencapai otonomi daerah yang efektif, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian keuangan mereka melalui optimalisasi PAD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat secara bijaksana. Desentralisasi keuangan juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen keuangan daerah agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Desentralisasi Keuangan

Daerah Tahun 2019

a. Rasio Kemandirian tahun 2019

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan realisasi anggaran PAD sebesar 2.844,07M dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 23.699,91M. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\ &= \frac{2.844,07\text{M}}{23.699,91\text{M}} \\ &= 0,1200 \end{aligned}$$

$$= 12,00\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 yaitu senilai 12,00%. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2019 memiliki pola hubungan yang instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemda, atau daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

b. Rasio efektivitas tahun 2019

Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan realisasi penerimaan PAD sebesar 2.844,07M dan Target penerimaan PAD sebesar 2.849,53M. Sehingga perhitungan efektivitas keuangan Pemda NTT pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \\ &= \frac{2.844,07\text{M}}{2.849,53\text{M}} \\ &= 0,99808 \\ &= 99,81\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efektivitas keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2019 adalah 99,81%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2019 dapat di katakan cukup efektif dikarenakan realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan.

c. Rasio Efisiensi tahun 2019

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 110,05M dan Realisasi penerimaan PAD sebesar 2.844,07M. Sehingga perhitungan efisiensi keuangan Pemda NTT pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ &= \frac{110,05\text{M}}{2.844,07\text{M}} \\ &= 0,0387 \\ &= 4\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efisiensi keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2019 adalah 4%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2019 dapat di katakan sangat efisien dikarenakan realisasi penerimaan PAD lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD .

d. Rasio Desentralisasi PAD tahun 2019

Rasio desentralisasi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan jumlah PAD sebesar 2.844,07M dan total pendapatan sebesar 28.150,38M. Sehingga perhitungan desentralisasi keuangan Pemda NTT pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \\ &= \frac{2.844,07\text{M}}{28.150,38\text{M}} \\ &= 0,1010 \\ &= 10,10\% \end{aligned}$$

Rasio desentralisasi (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berdasarkan analisis rasio desentralisasi keuangan pemda NTT tahun 2019, dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah masih kurang dengan persentase sebesar 10,10% karena realisasi PAD NTT tahun 2019 belum mencapai target anggaran PAD dikarenakan belum mampunya daerah untuk mengelola potensi-potensi daerah secara optimal.

2. Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Desentralisasi Keuangan Daerah Tahun 2020

a. Rasio Kemandirian tahun 2020

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 dengan realisasi anggaran PAD sebesar 3.542,98M dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 22.179,53M.

Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\ &= \frac{2.844,07\text{M}}{23.699,91\text{M}} \\ &= 0,1195 \end{aligned}$$

$$= 11,95\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 masih rendah sekali yaitu senilai 11,95%. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2020 memiliki pola hubungan yang instruktif yang artinya PAD belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Belanja daerah.

b. Rasio Efektivitas tahun 2020

Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 dengan realisasi penerimaan PAD sebesar 2.650,85M dan Target penerimaan PAD sebesar 3.542,98M. Sehingga perhitungan efektivitas keuangan Pemda NTT pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \\ &= \frac{2.650,85\text{M}}{3.542,98\text{M}} \\ &= 0,749 \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efektivitas keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2020 sebesar 75%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2020 dapat di katakan kurang efektif dikarenakan realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan karena dampak pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi berbagai sektor ekonomi.

c. Rasio Efisiensi tahun 2020

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 dengan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 164,16M dan Realisasi penerimaan PAD sebesar 2.650,85M. Sehingga perhitungan efisiensi keuangan Pemda NTT pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ &= \frac{164,16\text{M}}{2.650,85\text{M}} \\ &= 0.061927 \\ &= 6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efisiensi keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2020 adalah 6%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2020 dapat di katakan sangat efisien dikarenakan realisasi penerimaan PAD lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD.

d. Rasio Desentralisasi PAD tahun 2020

Rasio desentralisasi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2020 dengan jumlah PAD sebesar 2.650,85M dan total pendapatan sebesar 26.878,49M. Sehingga perhitungan desentralisasi keuangan Pemda NTT pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \\ &= \frac{2.650,85\text{M}}{26.878,49\text{M}} \\ &= 0.098623 \\ &= 9,86\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis rasio desentralisasi keuangan pemda NTT tahun 2020, dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah masih sangat kurang dalam mengelola potensi keuangan dengan persentase sebesar 9,86%. Realisasi PAD NTT tahun 2020 belum mencapai target anggaran PAD dikarenakan dampak pandemi COVID-19 dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata dan perdagangan yang merupakan kontributor signifikan terhadap PAD.

3. Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Desentralisasi Keuangan Daerah Tahun 2021

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2021

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dengan realisasi anggaran PAD sebesar 2.734,28M dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 22.393,05M. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\ &= \frac{2.734,28\text{M}}{22.393,05\text{M}} \\ &= 0,1221 \\ &= 12,21\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 masih rendah sekali yaitu senilai 12,21%.

b. Rasio Efektivitas tahun 2021

Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PAD sebesar 2.734,28M dan Target penerimaan PAD sebesar 3.946,97M. Sehingga perhitungan efektivitas keuangan Pemda NTT pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \\ &= \frac{2.734,28\text{M}}{3.946,97\text{M}} \\ &= 0.6928 \\ &= 69.28\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efektivitas keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2021 sebesar 69.28%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2021 dapat di katakan tidak efektif.

c. Rasio Efisiensi tahun 2021

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dengan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 426,27M dan Realisasi penerimaan PAD sebesar 2.734,28M. Sehingga perhitungan efisiensi keuangan Pemda NTT pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ &= \frac{426,27\text{M}}{2.734,28\text{M}} \\ &= 0.1559 \\ &= 15.59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efisiensi keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2021 adalah 15,59%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2021 dapat di katakan sangat efisien.

d. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah tahun 2021

Rasio desentralisasi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2021 dengan jumlah PAD sebesar 2.734,28M dan total pendapatan sebesar 26.388,55M. Sehingga perhitungan desentralisasi keuangan Pemda NTT pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \\ &= \frac{2.734,28\text{M}}{26.388,55\text{M}} \\ &= 0,1036 \\ &= 10,36\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis rasio desentralisasi keuangan pemda NTT tahun 2021, dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah masih kurang dalam mengelola potensi keuangan dengan persentase sebesar 10,36%.

4. Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Desentralisasi Keuangan Daerah Tahun 2022

a. Rasio Kemandirian keuangan tahun 2022

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dengan realisasi anggaran PAD sebesar 2.740,36M dan Bantuan Pusat dan Pinjaman sebesar 21.386,05M. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\ &= \frac{2.740,36\text{M}}{21.386,05\text{M}} \\ &= 0,1281 \\ &= 12,81\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 masih rendah sekali yaitu senilai 12,81% dengan pola hubungan yang instruktif.

b. Rasio Efektifitas tahun 2022

Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PAD sebesar 2.740,36M dan Target penerimaan PAD sebesar 3.791,53M. Sehingga perhitungan efektivitas keuangan Pemda NTT pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{2.740,36\text{M}}{3.791,53\text{M}} \\ &= 0,7228 \\ &= 72,28\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efektivitas keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 72,28%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2022 dapat di katakan tidak efektif.

c. Rasio Efisiensi tahun 2022

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dengan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 514,17M dan Realisasi penerimaan PAD sebesar 2.740,36M. Sehingga perhitungan efisiensi keuangan Pemda NTT pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ &= \frac{514,17\text{M}}{2.740,36\text{M}} \\ &= 0,1876 \\ &= 18,76\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efisiensi keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2022 adalah 18,76%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2022 dapat di katakan sangat efisien.

d. Rasio Desentralisasi tahun 2022

Rasio desentralisasi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dengan jumlah PAD sebesar 2.740,36M dan total pendapatan sebesar 25.633,32M. Sehingga perhitungan desentralisasi keuangan Pemda NTT pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \\ &= \frac{2.740,36\text{M}}{25.633,32\text{M}} \\ &= 0,1069 \\ &= 10,69\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis rasio desentralisasi keuangan pemda NTT tahun 2022 masih kurang dalam mengelola potensi keuangan dengan persentase sebesar 10,69%.

5. Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Desentralisasi Keuangan Daerah Tahun 2023

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2023

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dengan realisasi anggaran PAD sebesar 2.991,26M dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 22.409,19M. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan Pemda Provinsi NTT pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \\ &= \frac{2.991,26\text{M}}{22.409,19\text{M}} \\ &= 0,1334 \\ &= 13,34\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa persentase rasio kemandirian keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 masih rendah sekali yaitu senilai 13,34% dengan pola hubungan yang instruktif.

b. Rasio Efektifitas tahun 2023

Rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dengan realisasi penerimaan PAD sebesar 2.991,26M dan Target penerimaan PAD sebesar 3.928,84M. Sehingga perhitungan efektivitas keuangan Pemda NTT pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \\ &= \frac{2.991,26\text{M}}{3.928,84\text{M}} \\ &= 0,7613 \\ &= 76,13\%\end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efektivitas keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2023 sebesar 76,13%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2023 dapat di katakan kurang efektif.

c. Rasio Efisiensi tahun 2023

Rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dengan Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar 550,14M dan Realisasi penerimaan PAD sebesar 2.991,26M. Sehingga perhitungan efisiensi keuangan Pemda NTT pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ &= \frac{550,14\text{M}}{2.991,26\text{M}} \\ &= 0,1839 \\ &= 18,39\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas, Rasio efisiensi keuangan Pemda provinsi NTT pada tahun 2023 adalah 18,39%. Kemampuan Keuangan Pemda NTT pada tahun 2023 dapat di katakan sangat efisien.

d. Rasio Desentralisasi tahun 2023

Rasio desentralisasi keuangan daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 dengan jumlah PAD sebesar 2.991,26M dan total pendapatan sebesar 26.375,90M. Sehingga perhitungan desentralisasi keuangan Pemda NTT pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \\ &= \frac{2.991,26\text{M}}{26.375,90\text{M}} \\ &= 0,1134 \\ &= 11,34\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis rasio desentralisasi keuangan pemda NTT tahun 2023 masih kurang dalam mengelola potensi keuangan dengan persentase sebesar 11,34%.

PEMBAHASAN

1. Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti pada diketahui bahwa persentase nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah provinsi NTT periode 2019-2023 tidak banyak mengalami peningkatan ataupun penurunan, dengan rata-rata persentase selama 5 tahun berturut-turut sebesar 12,46%. Kemandirian keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

(NTT) pada tahun 2019-2023 masih tergolong rendah, karena masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja mereka. Hal ini menempatkan NTT dalam kategori "Belum Mandiri". Hal ini sejalan dengan pendapat Lubis 2017 dalam penelitiannya yaitu kemampuan keuangan DPPKAD Kota Medan tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Imbas dari pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian di NTT yang juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor-sektor unggulan termasuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pengaruh dari pandemi terhadap subsektor bidang pertanian dapat dilihat dari perbandingan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan pelaku usaha pada sektor pertanian, dengan melihat kemampuan produksi petani dari perbandingan hasil produksi dengan biaya produksinya. Sebagai sektor unggulan yang memiliki *share* besar terhadap PDRB serta mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan, pengembangan tiga sektor unggulan di NTT masih menemui beberapa kendala atau hambatan. Dari segi penerimaan pajak, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih belum signifikan walaupun memiliki porsi terbesar dalam struktur PDRB di NTT. Sementara itu penerimaan pajak dari sektor Konstruksi juga menurun dikarenakan adanya beberapa proyek di kawasan destinasi wisata Labuan Bajo yang tidak berulang di tahun 2021, serta pencairan beberapa proyek yang direncanakan pada tahun 2021 bergeser ke tahun 2022 sehingga penerimaan pajak menjadi berkurang (Kanwil DJP Nusa Tenggara, 2022).

2. Persentase Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023

Efektivitas keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 secara keseluruhan masih dikategorikan kurang efektif dengan rata-rata rasio sebesar 78,5%. Hal ini sejalan dengan pendapat Lubis 2017 dalam penelitiannya yaitu, Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Medan belum Efektif karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100% yaitu 83,62%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah belum memenuhi target yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Medan juga dapat dikatakan memiliki kinerja tidak baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Pandemi COVID-19 yang mulai berkembang sejak awal tahun 2020 menyebabkan perekonomian NTT mengalami kontraksi pada triwulan II-2020 yang sebagian besar dialami

oleh sisi lapangan usaha diantaranya di sektor perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan/minum, (Kajian Fiskal Regional tahun 2021, Provinsi NTT). Dampak pandemi COVID-19 tersebut masih berlanjut pada tahun 2021 yang ditambah dengan adanya refocusing dan pemotongan dana transfer dari pusat mengakibatkan capaian RPJMD untuk pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT pada tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, yang merupakan hasil sinkronisasi atas target makro pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, serta perubahan kebijakan nasional akibat dampak wabah pandemi COVID-19. RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 memiliki visi “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Berdasarkan data profil realisasi APBD secara agregat seluruh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di NTT pada tahun 2019 sampai dengan 2021, pendapatan daerah tahun 2021 tercapai 90,7 persen dari rencana penerimaan atau sebesar Rp25,21 triliun sedangkan pendapatan daerah turun 6,2 persen dibandingkan tahun 2020. Belanja daerah tahun 2021 menurun 8,0 persen dibandingkan tahun 2020, dimana total belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp25,14 triliun atau 82,7 persen dari total alokasi anggaran. Realisasi PAD NTT tahun 2021 adalah sebesar Rp2,42 triliun yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontributor terbesar dalam PAD adalah pajak daerah dengan 51,4 persen dari total PAD. Dalam tiga tahun terakhir tren realisasi PAD terus menurun sejak tahun 2020, dengan alasan utama penurunan adalah imbas dari pandemi COVID-19, khususnya pajak daerah.

3. Persentase Rasio Efisiensi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2019-2023

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang di terima oleh pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah dalam rasio efisiensi pendapatan asli daerah maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik ataupun sebaliknya, jika rasio efisiensi pendapatan asli daerah semakin besar maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin tidak efisien. Hasil analisis rasio efisiensi PAD Provinsi NTT menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah

selama lima tahun yakni tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 12,54%, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase rasio efisiensi keuangan pemerintah NTT sangat efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmayati 2016 yaitu Secara umum rasio efisiensi menunjukkan angka kurang dari 100% berarti bisa dikatakan bahwa Pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sudah efisien.

4. Persentase Rasio Desentralisasi keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara timur tahun 2019-2023

Rasio derajat desentralisasi menurut Putra (2018) adalah hasil perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri.

Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi yang menunjukkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur belum bisa mengelola dan memaksimalkan potensi PAD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan sumber daya alam dimana NTT merupakan daerah yang kurang kaya akan sumber daya alam seperti pertambangan dan kehutanan yang bisa menjadi pendapatan utama PAD, sebagian besar wilayah NTT berupa lahan kering dengan curah hujan rendah. Tingkat perekonomian NTT yang masih rendah juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan basis pajak dan retribusi daerah masih sangat terbatas. Infrastruktur dan aksesibilitas terbatas karena sebagian besar wilayah NTT masih sulit dijangkau dengan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara yang kurang memadai sehingga mobilitas ekonomi dan investasi di daerah terhambat. Kualitas SDM yang masih rendah sehingga menyulitkan upaya penggalan dan pengelolaan PAD secara maksimal serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pariwisata meskipun memiliki banyak obyek wisata yang dapat mendatangkan pendapatan yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah Kinerja Keuangan pada Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, selama periode 2019-2023 sedikit mengalami kenaikan. Namun tingkat kemandirian masih tergolong rendah karena masih terdapat peran dominan pemerintah pusat. Kinerja keuangan pemerintah menurut rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi NTT selama periode

2019-2023 dapat dikategorikan kurang efektif. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efisiensi PAD Provinsi NTT dapat dikategorikan sangat efisien. Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi diketahui bahwa selama lima tahun periode 2019-2023 memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sedikit mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi kemampuan keuangannya masih dalam kategori kurang mampu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan variabel penelitian yang lain. Karena itu, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengikutsertakan pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pemetaan kota seperti wilayah mana saja yang memberikan kontribusi positif dan negatif terhadap keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2017). Metodologi Penelitian. Airlangga University Press.

- Antari, N. P. G., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2).
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi UN PGRI Kediri*, 4(3).
- Bahihagi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Salemba Empat.
- Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *JOM Fekon*, 4(1).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Data APBD. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Fahmi. (2011). *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*. Alfabeta.
- Gavrea, C., Ilies, L., & Stegorean, R. (2011). Determinants of Organizational Performance: The Case of Romania. *Management & Marketing: Challenges for the Knowledge Society*, 6(2), 285-300.
- Gibson. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Keempat)*. Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hantanto, & Ghodang, H. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep Dasar & Aplikasi Regresi dan Jalur dengan SPSS*. PT. Penerbit Mitra Grup.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 15-29.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 8, 1-29.
- Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui penerapan e-Government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 194-197.

- Lubis, F. K. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Kota Medan.
- Lucky, D. (2013). Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19), 7-17.
- Macella, A. (2020). Kinerja Organisasi Publik Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Jurnal Public Policy*, 6(1).
- Mahmudi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management. Andi.
- Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
- Novianto, & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1-17.
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Pettalolo, I. (2013). Pengaruh Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 1(7).
- Priyatno, D. (2013). Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS. Mediakom.
- Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Rajawali Press.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018.

- Riduansyah, M. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal MAKARA*, 11(2).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23-32.
- Rujakat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Deepublish.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas*, 408-425.
- Sugiarto, & Siagian, D. (2006). *Metode Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suharyadi, & Purwanto. (2008). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern (Edisi 2)*. Salemba Empat.
- Sumawan, I. W., & Sukarta, I. M. (n.d.). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1727-1754.
- Suparmoko, M. (2005). *Keuangan dalam Teori dan Praktek*. BPFE.
- Tamawiyu, J. J. S., Warongan, J. D. L. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Ekonomi*.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (n.d.). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360-2387.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Winardi, J. (2019). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Kencana.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Edisi ke-4)*. UPP STIM YKPN.
- Wulandari, A. (2002). *Kemampuan keuangan daerah kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Yuwono, S., et al. (2007). *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2000). *Service Marketing (2nd ed.)*. McGraw Hill.